

SINERGITAS INSTANSI MARITIM DALAM RANGKA PENANGGULANGAN NARKOBA DI TELUK JAKARTA

MARITIME INSTITUTION SINERGY IN THE DRUG CONSTRUCTION FROM JAKARTA BAY

Sunardi¹, Agus Adriyanto², Suhirwan³

Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan
(nardisunardi571@gmail.com, a_adriyanto@yahoo.com; suhirwan@idu.ac.id)

Abstrak - Narkoba merupakan tantangan yang sangat kompleks dan diperlukan mekanisme di antara lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan di laut untuk menegakkan hukum yang berlaku, sehingga sindikat penyelundup narkoba diharapkan dapat ditangani sesuai dengan hukum. Jakarta mempunyai 7 pelabuhan resmi diantaranya pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Marina, pelabuhan Muara Angke, pelabuhan Marunda, pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan Muara Baru, pelabuhan Pantai Mutiara. Lembaga penegak hukum di laut harus bekerja sama untuk melindungi perairan Teluk Jakarta. Ada banyak celah yang dapat digunakan oleh mafia narkoba untuk menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan tidak resmi. Penyelundup narkoba juga menggunakan nelayan untuk membawa barang haram dari kapal besar untuk dibawa ke daratan Jakarta melalui pelabuhan tidak resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi penyelundupan narkoba dengan menganalisis tugas utama penegakan hukum di laut Teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, sebagai teori analisis menggunakan teori sinergitas menurut Stephen Covey yaitu kerjasama, koordinasi dan komunikasi. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data dengan model interaktif Miles Huberman. Pola operasi yang dilakukan saat ini adalah dengan melaksanakan operasi mandiri maupun gabungan dan menunjukkan hasil yang signifikan antar instansi maritim yang bergerak di laut. Mempertimbangkan potensi ancaman yang sedemikian besar, perlu disinergikan penegakan hukum di laut untuk pencegahan narkoba di Teluk Jakarta.

Kata Kunci: Kerjasama Instansi Maritim, Strategi Pertahanan Laut, Penanggulangan Narkoba, Penegakan Hukum di Laut, Pola Operasi.

Abstract – Drugs are a very complex challenge and mechanisms are needed among institutions that have authority at sea to enforce applicable laws, so that the syndicates of narcotics smugglers are expected to be dealt with according to the law. Jakarta has 7 official ports including Tanjung Priok Port, Marina Port, Muara Angke Harbor, Marunda Harbor, Sunda Kelapa Harbor, New Port Pelabuhan, Pearl Beach Harbor. Law enforcement agencies in the sea must work together to protect the waters of Jakarta Bay. There are many gaps that can be used by drug mafia to smuggle drugs through unofficial ports. Drug smugglers also use fishermen to carry illicit goods from large ships to be brought to the mainland of Jakarta through unofficial ports. This study aims to overcome drug smuggling by analyzing the main tasks of law enforcement in the Jakarta Bay sea. This study uses a descriptive qualitative method of phenomenology approach, as the theory of analysis using the theory of synergy according to Stephen Covey namely cooperation, coordination and communication. Primary data

¹ Strategi Pertahanan Laut Universitas pertahanan

² Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan

³ Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan

collection was obtained through structured interviews, questionnaires, while secondary data was obtained through literature studies. Data validity uses triangulation of data sources. Data analysis with the interactive model of Miles Hubberman. He current pattern of operations is to carry out independent and joint operations and show significant results among maritime agencies engaged in the sea. Considering the potential for such a huge threat, it is necessary to synergize the law enforcement in the sea for the prevention of drugs in the Jakarta Bay.

Keywords: Maritime Agency Cooperation, Sea Defence Strategy, Drug Management, Law Enforcement of Sea, Pattern of Operations.

Pendahuluan

Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan ibu kota negara Indonesia serta teluk Jakarta merupakan pintu masuk perekonomian untuk membawa komoditi dari berbagai negara. Anggapan tersebut membuat setiap negara merasa mempunyai hak untuk melintasi dan memanfaatkan teluk Jakarta untuk jalur perdagangan. Kebutuhan melintasi dan memanfaatkan lautan secara bersama-sama selama ini difasilitasi oleh perangkat hukum laut internasional yang mengatur antara hak dan kewajiban setiap negara berkaitan dengan perlintasan melalui laut yang bersinggungan dengan keamanan dan kedaulatan sebuah negara.

Selain itu UNCLOS 1982 yang telah di ratifikasi juga memberikan tanggung jawab yang besar. Indonesia dalam mengelola laut baik untuk kepentingan nasional sebagai sumber perekonomian

negara, secara regional berbatasan dengan negara-negara tetangga yang juga memiliki kepentingan mengelola laut serta secara international perairan Indonesia merupakan perairan Vital yang dapat berpengaruh pada perdagangan, kepentingan pertahanan global maupun keseimbangan ekosistem laut global⁴. Terlepas dari melimpahnya sumber daya kelautan, adanya peningkatan kegiatan pemanfaatan area perairan di wilayah Indonesia yang dimanfaatkan eksplorasi serta eksploitasi potensi ekonomi laut serta kegiatan transportasi laut yang terjadi saat ini, berdampak pada semakin meningkatnya tindak pelanggaran di wilayah Indonesia⁵. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Pertahanan no.3 tahun 2002 tentang sistem pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan

⁴ Jacub, *Menata Ruang Laut Terpadu*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm 33.

⁵ Sayidiman Suryohadiprojo. *Kemaritiman Indonesia*. <http://Sayidiman,Suryohadiprojo.com>, 2015. diakses pada 23 juli 2019.

yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya nasional, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman⁶. Menyikapi permasalahan yang semakin berkembang sebagai lembaga penegak hukum di laut seyogyanya harus senantiasa waspada guna menghadapi setiap ancaman yang berkembang saat dan menjadi trend dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi penyelundupan narkoba yang selama ini para pelaku lebih cenderung memilih melalui jalur laut, hal ini di karenakan masih banyak celah yang ia lakukan baik melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi dan tidak di jaga oleh aparat penegak hukum serta keterbatasan jumlah sumberdaya manusia yang di miliki oleh instansi tersebut. Sedangkan berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa ancaman tentang narkoba baik melalui akses pintu pelabuhan secara resmi maupun pelabuhan tidak resmi kian bertambah

dan sangat sulit sekali untuk menangkap walaupun sudah banyak tertangkap namun mereka sekali lolos dari pantauan dan pengamatan petugas maka berapa masyarakat yang berdampak menggunakan obat terlarang tersebut. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan menanggulangi narkoba ini bahkan membentuk badan tersendiri untuk fokus menangani narkoba namun juga belum bisa di katakan maksimal. TNI sebagai lembaga pertahanan negara yang bertugas melindungi segenap bangsa dari hal-hal yang mengancam keutuhan bangsa.

Jakarta sebagai tempat pusat pemerintahan dan ibu kota negara merupakan tujuan bagi para investor baik yang bergerak di bidang komoditi maupun perizinan serta kapal-kapal yang mengangkut peti kemas melalui pelabuhan Tanjung Priok. Disamping itu juga tempat peredaran uang terbanyak guna menunjang sektor ekonomi, banyaknya gedung pencakar langit yang megah yang menyerap tenaga kerja terbanyak dari seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Selain itu juga sebagai

⁶ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014). hlm.59

tempat bisnis dan tempat hiburan malam dan berkumpulnya manusia untuk mempertahankan hidup mencari lapangan pekerjaan. Di samping itu Jakarta memiliki 7 pelabuhan laut diantaranya 1. Pelabuhan Tanjung Priok, 2. Pelabuhan laut Marina, 3. Pelabuhan laut Muara Angke, 4. Pelabuhan Sunda Kelapa, 5. Pelabuhan Marunda, 6. Pelabuhan Muara Baru, 7. Pelabuhan laut Pantai Mutiara.

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika⁷.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif memiliki dasar

deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Pada penelitian kualitatif berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, lalu hasilnya akan memunculkan teori dari data tersebut. Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban⁸. Subyek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian atau narasumber yang memberikan informasi yang berasal dari Kepala badan keamanan laut Republik Indonesia (Kabakamla), Panglima Koarmada I, Asisten Operasi Danlantamal

⁷ Lisa Juliana FR, Sutrisna Nengah W. *Narkotika,Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm.2

⁸ Abu Ahmadi, dan Cholid Nabuko. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 83.

III, Komandan Satuan Patroli Lantamal III, Kepala Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kepala Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Komandan Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Komandan Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3).

Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi, kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data⁹. Untuk mengetahui serta menganalisa sinergitas instansi maritim menggunakan teori Stephent Covey yang meliputi kerjasama, koordinasi dan komunikasi. Dari ketiga hal tersebut maka kita dapat mengukur sejauh mana keberhasilan dari instansi tersebut untuk melaksanakan program kerja yang telah disepakati bersama baik itu melalui koordinasi maupun komunikasi yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Pangkalan TNI Angkatan laut (Lantamal) III Jakarta tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sejarah berdirinya TNI AL itu sendiri, Karena Pangkalan merupakan

salah satu dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yaitu yang terdiri dari Pangkalan, Kapal, Marinir dan Pesawat Udara (Pesud). Keempat unsur yang dimiliki oleh TNI AL harus senantiasa siaga dan siap sedia sehingga hal tersebut harus di latih kemampuan sumberdaya manusianya yaitu personil marinir, kesiapan Kapal Perang Indonesia (KRI), armada tempur pesawat udara dan pangkalan harus senantiasa siap sedia untuk memberiiikan dukungan dan pelayanan unsur-unsur KRI. Tugas pokok Lantamal III Jakarta adalah menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi unsur-unsur TNI Angkatan Laut, pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara dibidang kemaritiman. Menyikapi tugas pokok tersebut unsur pangkalan harus selalu siap untuk menyediakan kelengkapan maupun suku cadang ketika KRI mengalami suatu permasalahan mesinnya sehingga dengan adanya keberadaan pangkalan sesegera mungkin bisa mencarikan solusi dan jalan untuk perbaikan unsur KRI yang sedang mengalami permasalahan.

Lantamal III Jakarta sebagai unsur pendukung dan pelayan di dalam

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014).

melaksanakan kewajibannya mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan petunjuk kerja (juker), yang merupakan penjabaran lebih lanjut Prosedur Lantamal III yang disahkan oleh Keputusan Kasal Nomor Kep/805/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Daftar Susunan Personel (DSP) pada organisasi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Orgaspros Lantamal III)¹⁰. Tugas pokok Lantamal III Jakarta meliputi :

- a. Senantiasa bekerja menyiapkan fasilitas labuh bagi KRI apabila akan melaksanakan sandar, landasan bagi unsur pesawat udara dan Marinir serta unsur satuan lainnya apabila sedang melaksanakan kerja maupun latihan di Lantamal III Jakarta.
- b. Membuat dan menyusun program kerja untuk senantiasa membina kemampuan baik berupa sumberdaya manusianya, sarana dan prasarana pendukungnya yang ada di Lantamal III berdasarkan rencana serta program kerja

yang akan dilaksanakan oleh Komando Armada I.

- c. Berupaya membina kekuatan dan kemampuan personil melalui berbagai pendidikan maupun pelatihan guna melaksanakan pentahapan yang dimulai dari perencanaan, menyusun materi yang akan dilaksanakan, persiapan maupun pada akhir dari suatu perencanaan adalah pelaksanaan.
- d. Melaksanakan pembinaan kemampuan unsur dan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas, hal ini dilaksanakan karena segala sesuatu yang sifatnya berskala besar dan mengerakkan unsur KRI harus perintah dari Koarmada I dalam rangka penegakan kedaulatan serta hukum di laut dan melaksanakan koordinasi, pengaturan pertahanan pangkalan, membantu proses penyelesaian perkara pelanggaran keamanan laut

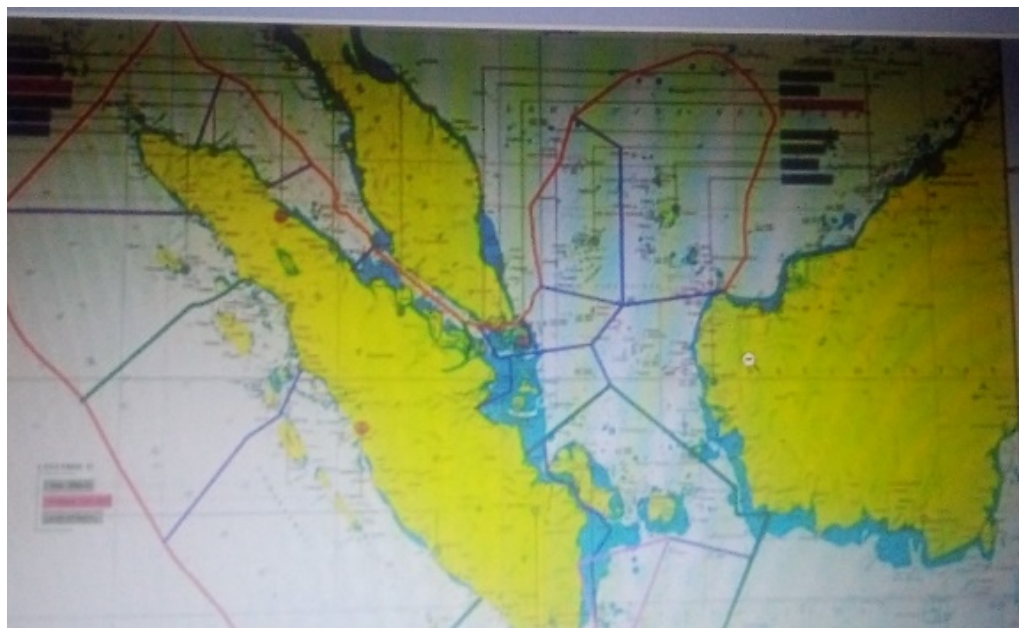
¹⁰ Keputusan Kasal Nomor: 805/III/2018 tentang Daftar Susunan Personel dan Organisasi Lantamal III, Jakarta: 28 Maret 2018

sehingga setiap permasalahan yang ada selalu berkoordinasi dengan pengkalan yang terdekat.

- e. Melaksanakan kemampuan yang dimiliki oleh Lantamal III Jakarta dengan cara melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan kapal baik melalui satuan kerja fasilitas pemeliharaan kantor (Fasharkan) sehingga apabila kapal mengalami kendali bisa dilaksanakan perbaikan yang sifatnya tidak terlalu berat, apabila rusaknya berat maka sudah ada pihak ketiga sebagai rekanan yang dengan segera

samping itu juga melaksanakan perbaikan unsur pesawat udara dan kendaraan lainnya yang digunakan dalam rangka operasional untuk kesiapsiagaan operasi TNI AL.

- f. Senantiasa melaksanakan pembinaan kemampuan unsur dalam rangka kesiapan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas untuk melaksanakan operasi dalam rangka penegakan kedaulatan serta hukum di laut dan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain apabila permasalahan tersebut untuk ditindaklanjuti, pengaturan



Gambar 1. Peta kerja Lantamal III Jakarta
Sumber: Staf Operasi Lantamal III Jakarta, (2019)

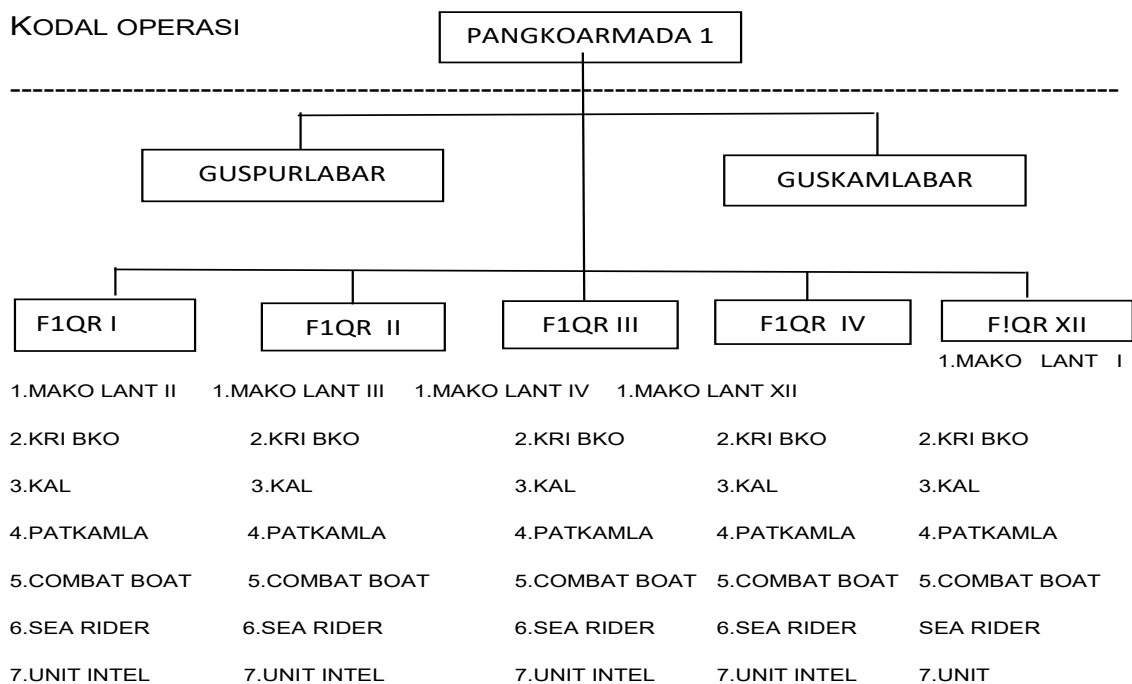
memfasilitasi hal tersebut. Di

pertahanan pangkalan, serta

membantu proses penyelesaian perkara pelanggaran keamanan laut dan memfasitasi dengan memberikan bantuan hukum sampai dengan selesai pemberkasan untuk dilimpahkan ke instansi yang lainnya.

g. Senantiasa melaksanakan pembinaan potensi maritim yang melibatkan satuan kerja Paspotmar (Perwira Staf Potensi Maritim) sehingga menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negara di laut yang berdasarkan rencana dan program Komando Armada I.

Di dalam pelaksanaannya di lapangan maka Lantamal III Jakarta juga memiliki satuan khusus yang bertugas untuk menindak setiap kejadian tindak kejahatan baik berupa penyelundupan BBM, manusia, Perompakan, Pembajakan, maupun pencurian sumber daya alam, pencurian ikan, lebih khusus lagi tentang penyelundupan narkoba. Satuan reaksi cepat tersebut diberi nama Fleet 1 Quick Responsible (F1QR), angka satu menunjukan wilayah Kotama Koarmada I. Pada pelaksanaan F1QR panglima Koarmada 1 selaku penanggung jawab sedangkan Komandan Gugus Tempur Laut Barat (Guspurlabar) dan Gugus Tempur Keamanan Laut Barat (Guskamlabar) mengatur seluruh unsur



Gambar 2. Struktur organisasi F1QR
 Sumber: Staf Operasi Lantamal III Jakarta, (2019)

untuk gelar kekuatan yang diselenggarakan di wilayah barat sesuai dengan kebutuhan ancaman yang terjadi saat itu. Kekuatan personel tentunya memiliki kualifikasi yang lebih dengan satuan yang lainnya sehingga mereka mempunyai kecakapan dan ketepatan didalam setiap melaksanakan operasi. Struktur organisasi F1QR Lantamal III Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.

F1QR adalah satuan kecil yang mempunyai ketangguhan dan kecepatan di dalam melaksanakan tugas serta kemampuan sumber daya manusianya mempunyai ketrampilan dan keahlian baik dari segi menembak pada posisi bergerak maupun mengemudi Sea rider dengan baik, disamping itu kemampuan di dalam menindak serta melumpuhkan lawan secara profesional. Gerakannya memperhatikan kecepatan serta ketepatan di dalam setiap menanggulangi tindak kejahatan di laut. Kesiapsiagaan pasukan ini selama 24 jam, kapanpun apabila mendapatkan informasi dan komunikasi baik dari intelijen maupun komando atas selalu siap untuk bergerak dan menyelesaikan

tugas secara cepat dan tepat sesuai prosedur yang berlaku.

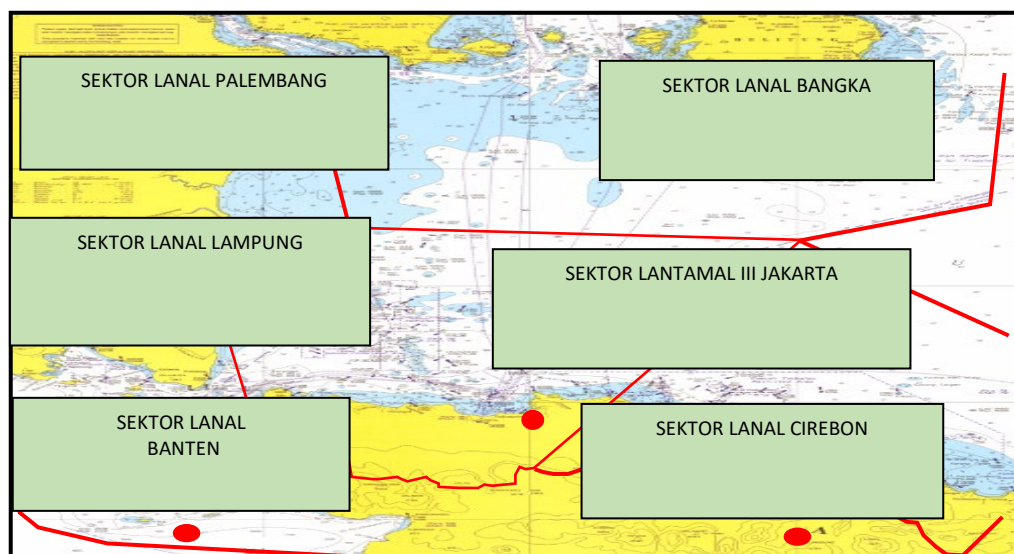
Disamping itu Lantamal III Jakarta juga mempunyai satuan patroli (Satrol) Lantamal dalam aspek pembinaan berkedudukan langsung di bawah Komandan Lantamal dan dalam aspek operasional di bawah komando pelaksana operasi. Tugas Satrol Lantamal bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dan melaksanakan operasi keamanan laut dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja Lantamal¹¹. Sedangkan tugas dan fungsi dari Satuan Patroli antara lain:

- a. Pembina kemampuan personel dan material guna meningkatkan kesiapan unsur-unsur organiknya.
- b. Pelaksana operasi keamanan laut dalam rangka menegakan hukum di wilayah kerjanya atas perintah komando pelaksana operasi.
- c. Pelaksana proses hukum terhadap pelanggaran tindak pidana tertentu di laut sesuai

¹¹ Peraturan Kasal Nomor: 18 Tahun 2017, tentang Likuidasi Satuan Kapal Patroli Komando Armada dan Pembentukan Satuan

Kapal Patroli Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut.

- peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Pelaksana koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di kawasan wilayah kerjanya.
 - e. Pelaksana dukungan pencarian dan pertolongan terhadap kejadian dan kecelakaan di laut.
 - f. Menetapkan dan menjamin terlaksananya program Satuan Kapal Patroli Lantamal yang meliputi bidang pembinaan personel, material, metode dan pembinaan latihan.
 - g. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan program Satuan Kapal Patroli Lantamal serta alokasi sumber daya yang ditentukan oleh Danlantamal.
 - h. Menyediakan unsur-unsur KRI siap operasi untuk mendukung kepentingan operasi Komando Pelaksana Operasi (Kolaksops).
 - i. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan teknis dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesiapan materiel melalui pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sesuai dengan tuntutan pemeliharaan materiel kapal dan tingkat kewenangannya.
 - j. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan personel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keterampilan personel melalui latihan-latihan



Gambar 3. Peta Wilayah

Sumber: Staf Operasi Satrol Lantamal III Jakarta, 2019

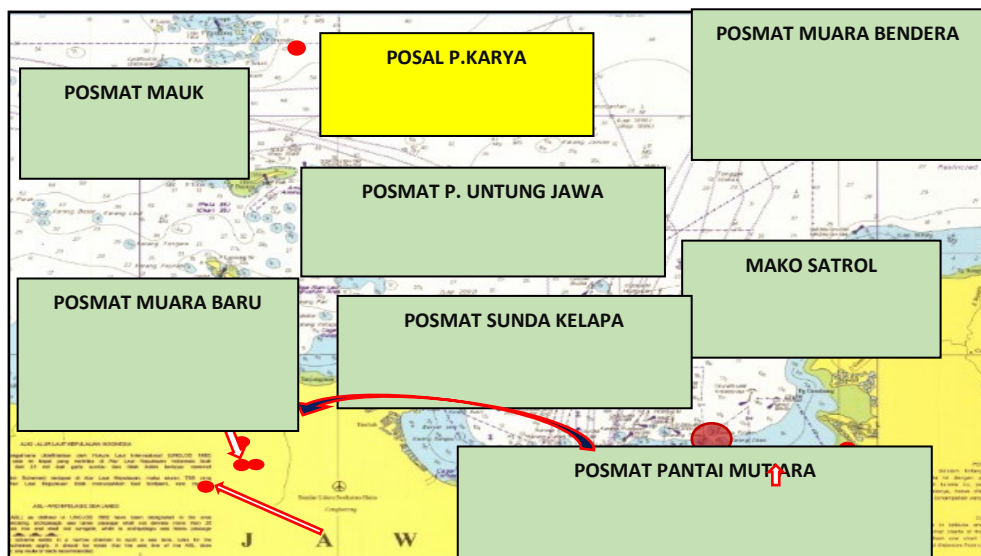
individual, latihan tim dalam pos tempur dan dalam departemen serta latihan kapal antar departemen (latihan peran).

Peran satuan patroli inilah yang bisa diharapkan untuk saling koordinasi dengan satuan samping agar terjalin komunikasi yang baik dan terarah dalam rangka menindak setiap kejahatan yang melintas maupun berupaya untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke Ibu Kota Jakarta melalui jalur laut yaitu Teluk Jakarta.

Dari peta kerja yang ditunjukkan oleh satuan patroli Lantamal III maka cakupannya sangat luas sekali dengan demikian maka pentingnya saling menjalin kerjasama dengan instansi yang mempunyai kerja dan tugas pokok yang sama yaitu mengamankan wilayah

perairan teluk Jakarta agar terbebas dari penyelundupan narkoba.

Para instansi ini perlu mengetahui bahwa mereka bukan *single agent* yang harus mengerjakan semuanya sendiri dikarenakan keamanan laut tidak bisa diselesaikan atau diawasi satu badan saja. Kejahatan kelautan tak hanya sebatas penangkapan ikan secara *illegal*, perompakan, pembajakan, pencurian sumber daya alam di laut, perbudakan, perdagangan manusia hingga penyelundupan narkoba dan itu merupakan bagian dari ancaman non militer, oleh karena itu penanganan berbagai aksi kejahatan tersebut harus melibatkan banyak pihak. Pada akhirnya sinergitas pengamanan laut di Indonesia juga bisa memberikan jaminan di dalam negeri dan dunia internasional bahwa



Gambar 4. Peta Kerja Satrol Lantamal III Jakarta
Sumber: Staf Operasi Satrol Lantamal III Jakarta, 2019

tata kelola laut Indonesia sudah memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa transportasi lewat laut. Ancaman non militer bisa ditekan sekecil mungkin sehingga sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia dapat terjaga tumbuh subur dan lestari serta penyelundupan dan tindak kejahatan makin berkurang dengan adanya sinergi antar instansi maritim dalam hal ini yang memiliki kapal. Sinergitas instansi maritim dalam rangka penanggulangan narkoba di sini adalah suatu kegiatan gabungan atau kerja sama lebih dari dua lembaga atau organisasi yang berbeda untuk memberikan hasil yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan fungsi masing-masing guna menunjang suatu situasi keamanan wilayah laut di perairan Teluk Jakarta.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa:

- a. selama ini masih berjalan sendiri-sendiri di dalam melaksanakan operasi karena mereka masih mementingkan tugas pokok sehingga cenderung perannya bersifat ego sektoral.
- b. Alat komunikasi yang ada masih terbatas karena tidak

memanfaatkan dan mengoptimalkan Komando pengendalian (Kodal) yang ada.

- c. Alutsista yang ada sebagian sudah lama sehingga fungsinya tidak bisa digunakan secara optimal.
- d. Kurangnya koordinasi di dalam pelaksanaan pemberantasan penyelundupan narkoba di Teluk Jakarta.

Jika setiap instansi mempunyai suatu program kerja dan operasi maka tidak salahnya dilakukan hal-hal mana saja dapat di sinergikan dalam bentuk latihan gabungan ataupun melaksanakan pelatihan secara bersama guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik dibidang metode pengejaran maupun teknik pemeriksaan sehingga apabila melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur tetap yang berlaku. Sesuai pendapat dari Kasi P2 Bea dan Cukai Tanjung Priok bahwa bekerja sama apabila ada program baik itu latihan bersama maupun gelar operasi bersama-sama sehingga akan menjadikan efisiensi baik anggaran maupun kemampuan alat dapat dijaga semaksimal mungkin. Kegiatan tersebut meningkatkan semangat kerja sama yang terstruktur mampu membuat anggaran menjadi

efisien. Kejelasan informasi yang harus sering dilakukan adalah koordinasi bila perlu adanya komando pengendalian dan saat ini sebenarnya sudah ada di Kantor Pusat Bea dan Cukai namun belum begitu dioptimalkan. Selanjutnya Asops Danlantamal III menyampaikan pandangan bahwa penyelundupan narkoba yang terjadi di teluk Jakarta baik itu Bea dan Cukai maupun BNN apabila mendapatkan informasi tindak kejahatan maka kapal TNI AL selalu siap untuk membantu penangkapan. Menurut Stephen Covey, justru komunikasi merupakan ketrampilan yang paling penting dalam hidup kita. Kita menghabiskan sebagian besar jam di saat kita sadar dan bangun untuk berkomunikasi. Sama halnya dengan pernafasan, komunikasi kita anggap sebagai hal yang otomatis terjadi begitu saja, sehingga kita tidak memiliki kesadaran untuk melakukannya dengan efektif. Jadi syarat utama dalam komunikasi efektif adalah karakter yang kokoh yang dibangun dari fondasi integritas pribadi yang kuat. Kepercayaan Anda menjadi lebih tinggi, dan dalam kondisi tertentu, jika saya melakukan kesalahan, anda masih dapat memahami

dan memaafkan saya, karena anda mempercayai saya¹². Lebih lanjut tentang komunikasi menurut Kasi P2 KPLP bahwasannya komunikasi dapat dilakukan dengan cara adanya forum komunikasi instansi maritim atau adanya media center yang dapat digunakan oleh semua instansi sehingga setiap ada berita kejadian bisa saling mengikuti perkembangan yang terjadi, harapannya adalah saling memberikan informasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada pelaksanaan kerjasama antar instansi maritim selama ini sudah terjalin dengan baik, diantaranya dengan melaksanakan latihan gabungan bersama, latihan kursus cara penyelamatan apabila terjadi kecelakaan di laut, latihan cara melakukan penyidikan dan lain sebagainya. Sehingga perlunya ditingkatkan kembali karena masih maraknya kejadian-kejadian penangkapan selama ini, maka para pelaku penyelundupan narkoba masih berupaya untuk memasukkan barang tersebut melalui laut.

- a. Pelaksanaan koordinasi antar maritim yang telah terjalin pentingnya ditingkatkan

¹² Covey, S.R. *The Seven Habits of Highly Effective People*. Simon and Schuster. New York: 1989.

kembali agar senantiasa menciptakan iklim yang harmonis dan saling menghargai tugas pokok masing-masing namun demikian apabila ada hal-hal yang perlu di koordinasikan guna mensinergikan baik melalui pelatihan, cara penanganan penangkapan pelaku penyelundupan, maupun pelaksanaan operasi secara bersama-sama.

b. Komunikasi komando pengendalian (Kodal) yang selama ini di Bea dan Cukai Pusat masih kurang di optimalkan kembali oleh karena itu harus disinergikan baik pengawak alutsistanya maupun cara penggunaan teknologi tersebut. Informasi dengan memanfaatkan teknologi radar yang berada di Batam yaitu berupa IMMS, apabila setelah mendapatkan data mengenal kapal maka seyogyanya diinformasikan ke seluruh instansi maritim. Sehingga apabila mencurigakan bisa dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama.

c. Kewenangan

Setiap Instansi Maritim mempunyai tugas pokok masing-masing namun demikian karena mereka berperan menjaga keamanan dari ancaman nonmiliter (Pembajakan, perompakan, penyelundupan) kesemuanya itu merupakan ancaman yang sangat membahayakan negara. Oleh karena itu dengan adanya kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi harus bisa menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari penyelundupan narkoba.

d. Pola Operasi

Operasi dilaksanakan secara bergantian dan terjadwal antara instansi satu dengan yang lainnya agar pada saat operasi laut senantiasa ada yang mengawasi dan mengontrol apabila ada suatu kapal yang mencurigakan maka instansi yang pada saat itu bertugas selalu siap melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk mengimplementasikan sinergitas instansi maritim dalam rangka penanggulangan narkoba di Teluk Jakarta yang akan datang terdapat hal-hal yang perlu disarankan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Pentingnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tinjauan awal untuk penelitian selanjutnya mengenai

- penanggulangan narkoba di Teluk Jakarta.
- b. Perlu dikomunikasikan bentuk konsep kerjasama dan pola operasi bersama antar stake holder guna pelaksanaan pengamanan perairan Teluk Jakarta dari bahaya penyelundupan narkoba.
 - c. Sebagai kajian dalam ilmu pengetahuan untuk referensi di lembaga pendidikan khususnya Universitas Pertahanan dan Instansi Maritim.
 - d. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan masukan bagi instansi maritim diantaranya TNI AL, Bakamla, Bea dan Cukai, Polairud, KPLP dan KP3 tentang penanggulangan narkoba di Teluk Jakarta dengan menggunakan teori sinergitas.
 - e. Regulasi hukum harus diperbaiki guna menyamakan persepsi dalam suatu wadah untuk menunjang tugas pokok.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmadi, Abu dan Nabuko Cholid. (2013). *Metodologi Penelitian*, Jakarta. Bumi Aksara, Hlm 83.

Covey, Stephen.R. (2013), *The 7 Habits of Highly Effective People*. Tangerang Selatan. Binarupa Aksara.

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W. (2013), *Narkotika,Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika,Yoygakarta, Hlm.2

Kementerian Pertahanan. (2015), *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta, Kemenhan, Hlm.36.

Miles, Huberman dan Johnny Saldana, *Metode Penelitian*, 2014, hlm 14

Prof. Dr.Ir. Jacub,M.Sc. (2004), *Menata Ruang Laut Terpadu*, Jakarta .PT. Pradnya Paramita. Hlm 33.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Supriyatno Makmur,(2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan

Bea dan Cukai. (2019), *Staf Pencegahan dan Penindakan (P2)*. Tanjung Priok- Jakarta

Badan Narkotika Nasional. (2019), *Berdasarkan pemetaan wilayah Indonesia penyelundupan narkoba*. Jakarta. 2019

Dinas Penerangan BNN. (2019). *SIN (Sistem Informasi Narkoba)*, Jakarta

Dinas Hukum Polairud Polda Metro Jaya. (2019). *Data Narkoba Polairud Polda Metro Jaya 2016 dan 2019*. Jakarta

Keputusan Kasal Nomor Kep/805/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang *Daftar Susunan Personel (DSP) pada organisasi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Orgaspros Lantamal III)*. Jakarta

Peraturan Kasal Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Likuidasi Satuan Kapal*

Patroli Komando Armada dan Pembentukan Satuan Kapal Patroli Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut.

SK Gubernur. (2007), Surat

Keputusan, Nomor 171 tentang

Peraturan Daerah, Jakarta

Satuan Patroli. (2019), Wilayah kerja satrol Lantamal III, Staf Operasi.2019

Survei BNN. 2018, Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Website

Mangindaan, Robert. (2019), Indonesia dan Keamanan Maritim: Apa Arti Pentingnya?,
<http://www.fkpmaritim.org/indonesia-dan-keamanan-maritimapa-arti-pentingnya/>, diakses pada 3 agustus 2019.

Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Peta Propinsi DKI Jakarta.
<https://www.kodesingkatan.com/singkatan-provinsi-dki-jakarta-jk/peta-wilayah-provinsi-dki-jakarta>. diakses pada 18 Juli 2019.

Tjahyanto Hadi. (2018), TNI dan Bea Cukai Perkuat Kerja Sama Tangkal Penyelundupan.Jakarta.<https://www.inews>, diakses pada 22 Juli 2019.